

KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI

(Studi Kasus: Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan
Komeriing Ulu)

Rio Nusantara¹, Marratu Fahri², Eva Susanti³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas

Baturaja^{1,2,3}

Email: rio.nusantara11nya@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 3
Bulan : Maret
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Fajar Jaya Village is a rural area where the majority of the population works as farmers; however, not all farmers are involved in farmer groups. Out of 652 farmers, only 286 are registered as active members of farmer groups. This condition indicates that empowerment programs have not reached the entire farming community. The main issue identified is the suboptimal coordination between the Village Government and the Department of Agriculture, characterized by a lack of data synchronization, the absence of regular communication forums, unclear division of tasks, and weak joint evaluation mechanisms. These problems serve as the primary basis for conducting research on coordination patterns in empowering farmer groups in Fajar Jaya Village. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The theoretical framework is based on Hasibuan's concept of coordination, which focuses on four indicators: cooperation, communication, division of labor, and discipline. The study was conducted from May 20 to June 24, 2025, in Fajar Jaya Village and the Department of Agriculture of Ogan Komeriing Ulu Regency. The findings reveal that coordination remains administrative, lacks participatory elements, and is not yet integrated into the village development planning process. Based on these findings, it is concluded that coordination between the two parties has not been optimal. The researcher recommends the establishment of a formal coordination forum, increased involvement of the village in planning, clearer division of responsibilities, and strengthened communication and documentation to ensure that empowerment programs become more effective and sustainable.

Keyword: Coordination, Empowerment, Farmer Groups

Abstrak

Desa Fajar Jaya merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, namun belum seluruh petani tergabung dalam kelompok tani. Dari 652 petani yang ada, hanya 286 orang yang tercatat sebagai anggota kelompok tani aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan belum menjangkau secara menyeluruh. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian, yang ditandai oleh kurangnya sinkronisasi data, tidak adanya forum komunikasi rutin, pembagian tugas yang tidak tegas, serta lemahnya evaluasi kegiatan secara bersama. Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya penelitian mengenai pola koordinasi dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Fajar Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan mengacu pada konsep koordinasi dari

Hasibuan, yang menekankan pada empat indikator, yaitu kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Penelitian dilakukan pada 20 Mei – 24 Juni tahun 2025 di Desa Fajar Jaya dan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang berlangsung masih bersifat administratif, kurang partisipatif, dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa koordinasi antara kedua pihak belum berjalan optimal. Untuk mengoptimalkan koordinasi tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah seperti pembentukan forum koordinasi formal, peningkatan peran desa dalam perencanaan, kejelasan pembagian tugas, serta penguatan komunikasi dan dokumentasi agar program pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemberdayaan, Kelompok Tani.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah melalui pemberdayaan kelompok tani. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah bagi para petani untuk bekerja sama, berbagi informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha pertanian. Namun, keberhasilan program pemberdayaan kelompok tani tidak hanya bergantung pada peran satu pihak saja, melainkan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, khususnya antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis pembangunan di bidang pertanian.

Desa Fajar Jaya merupakan salah satu desa hasil pemekaran pada tahun 2011 yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Dari total 652 petani yang ada, hanya 286 orang yang tergabung dalam kelompok tani aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani dalam kelompok tani masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah kurang optimalnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam program pemberdayaan petani. Berdasarkan temuan awal di lapangan, koordinasi yang dilakukan masih bersifat sektoral, komunikasi antar pihak tidak berlangsung secara rutin, pembagian tugas dan tanggung jawab belum terstruktur dengan baik, serta tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan program masih rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam upaya pemberdayaan kelompok tani di Desa Fajar Jaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses koordinasi tersebut, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat guna

meningkatkan efektivitas pemberdayaan petani melalui kelompok tani serta mendukung pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena desa tersebut memiliki permasalahan terkait koordinasi dalam pemberdayaan kelompok tani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang dipilih berdasarkan relevansi serta keterlibatan langsung dalam proses pemberdayaan kelompok tani, yaitu Edi Saputra sebagai Staf Penyuluhan Dinas Pertanian, Yasir Arafah sebagai Ketua Balai Penyuluh Pertanian, Lidya sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan, Sumarlin Ismail sebagai Kepala Desa Fajar Jaya, serta Alfian Effendi sebagai Ketua Kelompok Tani. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerjasama

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Desa Fajar Jaya dan Dinas Pertanian masih bersifat parsial dan administratif. Pemerintah desa umumnya hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program, seperti penyediaan tempat kegiatan dan penyampaian undangan kepada peserta. Sementara itu, proses perencanaan program lebih banyak dikoordinasikan antara kelompok tani dan penyuluh pertanian. Hingga saat ini belum terdapat nota kesepahaman (MoU) atau dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar formal kerjasama antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi bersama terhadap keberhasilan program pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa meskipun hubungan informal dan komunikasi antar individu terjalin cukup baik, namun belum ada struktur kelembagaan yang secara fungsional mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring kegiatan pemberdayaan. Edi Saputra dari Dinas Pertanian menyampaikan bahwa pemerintah desa hanya dilibatkan untuk mendukung aspek teknis pelaksanaan, seperti penyediaan tempat dan pengumpulan peserta, tetapi tidak terlibat dalam penyusunan materi pelatihan ataupun perencanaan distribusi bantuan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan

Kepala Desa Fajar Jaya yang menyatakan bahwa pihak desa umumnya hanya menerima informasi dari penyuluh pertanian tanpa dilibatkan dalam rapat teknis program.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar institusi masih bersifat sektoral dan belum didasarkan pada prinsip kolaborasi strategis. Menurut teori koordinasi Hasibuan, kerjasama yang efektif harus melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam perencanaan program, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi bersama terhadap hasil yang dicapai. Tanpa adanya komitmen formal dan mekanisme komunikasi yang terstruktur, kerjasama yang terjadi cenderung bersifat simbolis dan kurang mampu menciptakan sinergi dalam pembangunan pertanian di tingkat desa.

Selain itu, kerjasama yang belum terinstitusionalisasi juga menyulitkan evaluasi terhadap keberlanjutan program, terutama dalam hal pemeliharaan bantuan seperti alat pertanian maupun pembinaan pasca pelatihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kelompok tani tidak memperoleh pendampingan yang konsisten sehingga menghambat pengembangan kapasitas kelembagaan mereka. Oleh karena itu, penguatan kerjasama kelembagaan, misalnya melalui forum koordinasi dan kesepakatan tertulis, sangat diperlukan agar setiap program pemberdayaan dapat dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara bersama.

2. Komunikasi

Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok tani masih didominasi oleh pola top-down yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Pemerintah desa jarang dilibatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi kegiatan. Informasi biasanya hanya disampaikan secara teknis menjelang pelaksanaan program. Pola komunikasi yang bersifat satu arah ini menyebabkan pemerintah desa kurang memahami substansi program dan mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara aktif.

Hasil wawancara dengan Yasir Arafah dan Lidya menunjukkan bahwa sebagian besar informasi mengenai kegiatan atau bantuan pertanian disampaikan oleh penyuluh kepada kepala desa secara informal. Bahkan dalam beberapa kasus, perangkat desa baru mengetahui adanya kegiatan sehari sebelum pelaksanaan, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kebutuhan logistik maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini tentu menghambat partisipasi optimal dari pemerintah desa dalam kegiatan tersebut.

Kurangnya komunikasi yang sistematis juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program. Alfian Effendi selaku Ketua Kelompok Tani menyampaikan bahwa banyak anggota kelompok tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai waktu dan tujuan pelatihan,

sehingga tingkat kehadiran dan partisipasi menjadi rendah. Tidak adanya forum komunikasi rutin antara Dinas Pertanian, penyuluh, pemerintah desa, dan kelompok tani menjadi salah satu penyebab utama lemahnya koordinasi komunikasi ini.

Menurut teori komunikasi organisasi, komunikasi yang efektif seharusnya bersifat dua arah dan terbuka agar setiap pihak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Fajar Jaya belum mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi ataupun evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Komunikasi yang terjadi masih bersifat instruktif, bukan dialogis.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Misalnya dengan membentuk forum koordinasi bersama atau mengadakan pertemuan rutin lintas lembaga setiap bulan, sehingga setiap pihak dapat menyampaikan laporan, kendala, serta masukan terkait kegiatan yang berlangsung. Komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan antar pihak dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan kelompok tani.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam program pemberdayaan kelompok tani belum diformalkan secara jelas. Penentuan tugas lebih banyak dilakukan secara situasional sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah desa umumnya hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sedangkan dinas dan penyuluh pertanian menangani aspek teknis. Ketidadaan struktur kerja yang terpadu sering menimbulkan tumpang tindih tugas dan kebingungan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tidak terdapat dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Edi Saputra dari Dinas Pertanian menyatakan bahwa peran pemerintah desa lebih banyak terbatas pada dukungan administratif kegiatan dan belum dilibatkan dalam proses perencanaan program. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk berperan aktif dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Kepala Desa Fajar Jaya, Sumarlin Ismail, juga menyampaikan bahwa pihak desa sering merasa ragu untuk mengambil inisiatif dalam kegiatan pertanian karena tidak adanya kejelasan mengenai batas kewenangan mereka. Akibatnya, pemerintah desa cenderung bersifat reaktif daripada proaktif dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Dalam teori manajemen publik, pembagian kerja yang efektif harus mempertimbangkan kompetensi, sumber daya, dan kewenangan masing-masing aktor agar pelaksanaan program berjalan secara efisien dan akuntabel. Namun dalam praktiknya di Desa Fajar Jaya, pembagian kerja tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip tersebut. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pemberdayaan tidak berjalan optimal karena adanya duplikasi peran dan lemahnya sistem pelaporan serta pengawasan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian yang menjelaskan secara jelas pembagian tugas, waktu pelaksanaan, dan mekanisme kerja setiap pihak. Dengan adanya SOP, pembagian kerja dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan mudah dievaluasi.

4. Disiplin

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani, belum terdapat jadwal rutin evaluasi maupun forum koordinasi yang mempertemukan seluruh pihak terkait. Kegiatan yang dilaksanakan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Selain itu, disiplin waktu dan pelaporan juga masih rendah karena tidak adanya sistem pemantauan yang baku. Akibatnya, berbagai program pemberdayaan tidak terintegrasi secara baik dalam rencana pembangunan desa dan sulit untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lidya selaku penyuluh pertanian, sebagian besar kegiatan koordinasi dilakukan secara insidental dan tidak disertai dengan pencatatan maupun pelaporan yang sistematis. Kegiatan yang seharusnya dilakukan secara berkala, seperti pelatihan kelompok tani atau pertemuan evaluasi setelah penyaluran bantuan, sering kali tertunda atau bahkan dibatalkan karena tidak adanya jadwal kerja yang jelas.

Kepala Desa Fajar Jaya, Sumarlin Ismail, juga menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak memiliki mekanisme pengawasan yang terstruktur terhadap pelaksanaan program pertanian. Hal ini menyebabkan desa kesulitan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dijalankan memberikan dampak bagi masyarakat. Minimnya kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program lintas sektor.

Dalam teori organisasi, disiplin merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, jadwal, dan standar yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sistem pengawasan dan penjadwalan kerja yang terkoordinasi, sulit

bagi lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur melalui pertemuan rutin dengan jadwal yang jelas serta sistem pelaporan dan monitoring yang transparan. Pemanfaatan teknologi sederhana seperti grup koordinasi melalui WhatsApp atau penggunaan aplikasi kalender bersama juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan kelompok tani.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa Fajar Jaya dan Dinas Pertanian dalam upaya pemberdayaan kelompok tani masih belum berjalan secara efektif dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Pada indikator kerjasama, hubungan antar lembaga belum bersifat kolaboratif dan belum didasarkan pada dokumen atau kesepakatan formal yang dapat menjamin kejelasan peran serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam aspek komunikasi, pola komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah, cenderung teknis, serta belum memberikan ruang dialog yang cukup untuk partisipasi dan evaluasi bersama.

Selanjutnya, pada indikator pembagian kerja, belum terdapat sistem pembagian tugas yang jelas dan terstruktur sehingga sering menimbulkan tumpang tindih maupun ketidakjelasan pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, pada indikator disiplin, kegiatan koordinasi belum dilakukan secara rutin dan tidak disertai dengan sistem evaluasi serta pelaporan yang baik. Minimnya jadwal pertemuan tetap, forum koordinatif, serta mekanisme pengawasan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan.

Secara keseluruhan, keempat indikator koordinasi tersebut belum terlaksana secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas program pemberdayaan kelompok tani di Desa Fajar Jaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan serta kebijakan operasional yang melibatkan berbagai pihak secara terpadu guna membangun sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam mendorong kemandirian serta peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan kelompok tani.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Fajar Jaya, maka beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian perlu membentuk forum koordinasi formal yang dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, sehingga dapat tercipta sinkronisasi program, evaluasi bersama, serta pembagian peran yang lebih seimbang antar pihak.
2. Perlu disusun dan disepakati nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian sebagai pedoman kerjasama yang resmi dan jelas dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani.
3. Pemerintah Desa perlu diberdayakan melalui berbagai pelatihan teknis maupun pendampingan agar mampu berperan lebih aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, serta evaluasi program pemberdayaan kelompok tani.
4. Diperlukan pembangunan sistem komunikasi dua arah yang terbuka dan terdokumentasi antara pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan Dinas Pertanian agar tidak terjadi kesenjangan informasi serta keputusan yang bersifat sepihak dalam pelaksanaan program.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitri. (2011). *Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Djohani, R. (2003). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Studio Driya Media.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soeharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T. (2003). *Redefinisi Penyuluhan*. Jakarta: Puspa.
- Setyowati, Y. (2019). *Komunikasi, Media, dan Pemberdayaan Masyarakat: Sinergi Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Zubaedi. (2014). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Artikel / Sumber Online
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I Provinsi Sumatera Selatan. Diakses dari:
<https://sumsel.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/773/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-provinsi-sumatera-selatan.html>
- Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu. (2024). Letak Geografis Kabupaten OKU. Diakses dari: <https://web.okukab.go.id/geografis/>
- Perry, O. A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses dari: <https://shorturl.at/t4HZ>
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kelompok Tani.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.